



Puluhan Kendaraan Ditolak Masuk DIY

JOGJA—Puluhan kendaraan berpelat nomor luar DIY ditolak masuk Bumi Mataram saat larangan mudik mulai diberlakukan Kamis (6/5).

Sirojul Khafid, Lugas Subarkah, &
Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

Sebanyak 10 titik penyekatan didirikan di sejumlah wilayah DIY untuk mengantisipasi kedatangan pemudik. Di perbatasan DIY-Jawa Tengah di Tempel, Sleman, puluhan mobil harus putar balik lantaran tidak memenuhi persyaratan perjalanan.

Kepala Pos Pengamanan (Kapospam) Tempel, Iptu Sanika, menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk kendaraan roda empat yang bernomor polisi selain AB dan AA Magelang. "Ada sekitar 30 unit kendaraan yang diputarbalikkan," ujarnya.

Mobil dengan nopol AB dan AA Magelang bisa lolos tanpa pemeriksaan karena masih ada toleransi. Sementara mobil dengan nopol selain itu harus menunjukkan surat tugas dan surat bebas Covid-19. Kendaraan yang diputarbalikkan kata dia, ada yang tujuannya mudik, tetapi ada juga yang memang memiliki kegiatan khusus di

► Mobil bernomor polisi AB dan AA Magelang bisa lolos tanpa pemeriksaan karena masih ada toleransi.

► Sedikitnya 25 kendaraan luar daerah dihentikan dalam pos penyekatan Hargodumilah di Kapanewon Patuk, Gunungkidul.

Jogja. Penjagaan hanya dilakukan di jam tertentu secara acak, sebanyak tiga kali dalam sehari.

Kapospam Prambanan, Iptu Hariyanto, mengatakan penjagaan di Pospam Prambanan berlangsung selama 1,5 jam mulai dari pukul 08.15 WIB. Dari penyekatan tersebut, sebanyak 50 kendaraan diperiksa, enam di antaranya disuruh putar balik. "Semua kami tanyakan tidak ada yang mengatakan mudik. Hanya mau ke tempat keluarga seperti itu dan tidak mudik. Namun memang administrasi tidak lengkap, ya kami minta putar balik," ungkapnya.

Kondisi yang sama terjadi di Bantul. Kepala Dinas Perhubungan Bantul Agus Suharyanto mengatakan sejumlah mobil yang diputar balik dan ditilang ini terlihat di posko Srandakan.

► Halaman 11

Puluhan Kendaraan... Aris mengungkapkan pada penyekatan kali ini, petugas juga memeriksa mobil boks dan truk yang tidak hanya berpelat nomor DKI Jakarta. Sejumlah mobil boks dan truk berpelat nomor selain DKI Jakarta juga diperiksa, sebagai antisipasi dipergunakannya mobil tersebut untuk mengangkut pemudik. "Hasilnya, tadi memang belum ditemukan. Mereka hanya membawa barang yang akan dikirim ke Bantul," ucapnya. Kapospam Temon, Kulonprogo, Iptu Nur Salim mengatakan 100 kendaraan diperiksa. Dari jumlah itu 14 di antaranya diminta putar balik. "Terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak empat unit. Sedangkan, kendaraan roda dua atau lebih sebanyak 96 kendaraan," kata Nur Salim. Petugas memeriksa kendaraan yang berasal dari luar yang masuk melalui pintu barat di wilayah Kapanewon Temon. "14 kendaraan terdiri dari bus, travel, dan kendaraan umum. Kendaraan yang diminta putar balik rata-rata berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya," kata Nur Salim. Di Gunungkidul, sebanyak 25 kendaraan luar daerah dihentikan dalam pos penyekatan Hargodumilah di Kapanewon Patuk, Gunungkidul. Meski demikian, tidak ada pengendara yang disuruh putar balik karena penumpang merupakan warga asli DIY. Kapospam Patuk, Iptu Paryadi mengatakan, hingga Kamis siang ada 25 kendaraan yang diperiksa. "Belum ada kendaraan yang diminta putar balik karena pengendara beserta penumpang merupakan warga dari wilayah DIY," katanya. Paryadi mengungkapkan penyekatan sempat dilakukan pada tengah malam. Petugas mendapati sebuah bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melintas. Namun demikian, pada saat diperiksa tidak ada penumpang di dalamnya. "Kami akan terus lakukan pemeriksaan dan dilakukan secara acak selama 24 jam," katanya.	Aturan Penyekatan Kebijakan larangan mudik tidak berlaku bagi para pekerja antarwilayah alias pelaju. Mereka adalah orang-orang yang dalam bekerja sehari-hari mengharuskan melintas antarpotinsi yang saling berbatasan. Salah satu pekerja pelaju yaitu Anggita Pratiwi, 25, warga Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Setiap hari ia harus menempuh perjalanan sekitar 24 kilometer ke Kota Jogja tempatnya bekerja di tengah aturan penyekatan larangan mudik. "Hari pertama aturan larangan mudik [Kamis] tidak ada pemeriksaan. Memang ada penyekatan," ujar Anggita, Kamis. Ia menjelaskan pos penyekatan ada di Pos Polisi Tempel, Sleman. Jalan dibagi dua lajur, yaitu kiri untuk yang diperiksa dan kanan untuk pengendara yang boleh jalan terus. "Saya berangkat tidak macet dan lancar walau ada penyekatan," katanya. Ia menambahkan kendaraan yang dicegat dan diperiksa hanya mobil, untuk sepeda motor tidak ada yang diberhentikan petugas. Karyawan salah satu perusahaan swasta di Kota Jogja ini menyebut jika nanti diperiksa ia tahu apa yang harus dibawa atau ditunjukkan kepada petugas. "Surat pengantar dari kantor tempat saya bekerja. Sejauh ini saya belum minta suratnya dari kantor sebab berdasarkan pengalaman penyekatan yang lalu [musim liburan saat awal Covid-19], tidak dicegat dan diperiksa. Jadi percaya diri saja pasti tidak diperiksa. Penyekatan itu hanya kabar saja, praktiknya kendaraan tidak dicegat [dengan ketat]," ujarnya yang setiap hari mengendarai sepeda motor untuk bekerja ke Kota Jogja ini. Saat berangkat bekerja, rata-rata ia akan sampai di Pos Polisi Tempel, Sleman sekitar 10.30 WIB dan ketika pulang kerja sekitar 19.30 WIB masuk wilayah Jawa Tengah. "Hari ini [kemarin] tadi penjagaan cukup banyak petugas, ada anggota TNI dan ambulans, dan kebanyakan pemotor dari arah Magelang boleh langsung lewat," ujarnya seraya menambahkan mayoritas kendaraan yang dicegat berpelat B, W, dan D. Sedangkan kendaraan berpelat AA (wilayah bekas Karesidenan Kedu, termasuk Magelang) tidak dicegat petugas.	Halau Bus Pengelola Terminal Giwangan mengalau 20 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang lolos dari perbatasan. Menurut Kepala Unik Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Giwangan Jogja, Bekti Zunanta, menjelaskan bus-bus tersebut bisa lolos karena beroperasi sebelum pukul 09.00 WIB, waktu penjagaan perbatasan belum dilakukan. "Pagi tadi [kemarin] masih banyak kendaraan yang masuk. Selama [bus] mereka tidak berstiker, kami suruh pulang. Takutnya membawa penumpang dari terminal," kata Bekti. Selain bus AKAP yang dihalau keluar terminal, sejumlah bus memilih bertahan di terminal. Pasalnya, sopir bus mengaku tidak punya ongkos untuk operasional. Pengelola terminal menyediakan 12 kamar gratis bagi kru bus yang hendak istirahat atau menginap. Salah satu sopir bus AKAP, Supardi, mengatakan selama perjalanan dari Purwokerto sampai Jogja, bus berstiker yang dia kendari tidak mendapat penumpang satu pun. "Kosong blong, enggak ada penumpang," kata Supardi. "Biasanya aja empat, ada lima penumpang." Mudik Aglomerasi Sementara itu, Pemerintah Pusat melarang mudik lokal di kawasan aglomerasi. Pelarangan ini sebagai bentuk upaya mencegah penularan Covid-19. DIY masuk dalam daftar delapan wilayah aglomerasi yang sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah. "Untuk memecah kebingungan masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain," kata Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito. Wiku meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pelarangan tersebut. Kegiatan di sektor-sektor esensial tetap beroperasi. "Namun perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain kegiatan mudik di dalam satu wilayah kota/kabupaten aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah," ujar dia.	Gubernur DIY Sri Sultan HB X tidak menampik pasti ada pemudik yang lolos dari pantauan petugas. Misalnya ada pemudik yang tidak bawa surat keterangan apapun, keluar dari Jakarta lolos, kemudian masuk Jawa Barat lolos lagi, lalu masuk Jawa Tengah juga lolos, berarti masuk Jogja. Sultan meminta Satgas harus menanggapi persoalan tersebut apakah diterima atau tidak. Jika diterima harus dipastikan dalam kondisi sehat, alamat dan nomor teleponnya harus terdata dengan baik supaya mudah memantaunya. Pemudik yang datang atau lolos ke Jogja juga kemungkinan tidak hanya dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, namun juga dari luar Jawa yang kasus Covid-19 masih tinggi. Bagi pemudik yang lolos, Sultan berharap dapat terdata dengan baik oleh Satgas Covid-19, misalnya harus karantina selama lima hari dengan biaya sendiri, kemudian dites <i>suab</i> jika positif otomatis harus menjalani isolasi di seker. Selain itu yang paling penting pemudik yang lolos tahu alamat dan nomor telepon selulernya. "Dia [pemudik] bisa kami kontrol lewat Jogja PASS, mungkin di rumah sendiri atau di hotel di mana pun yang penting terpantau," katanya. Sultan berharap tidak ada kenaikan signifikan kasus Covid-19 pada momen Idulfitri ini. "Saya hanya punya harapan bagaimana tidak ada kenaikan [kasus Covid-19] yang signifikan dalam peristiwa nanti Idulfitri di Jogja," kata Sultan. <i>(David Kurniawan, Jumail, & Harit Yudi Supribo/ Mata Harawati/ Detik)</i>
--	---	--	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Terminal			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005